



DPMPTSP



2021

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA**

**DINAS PENANANMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam TA. 2021 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undagan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMPTSP Kota Batam Tahun 2021 harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 di dalam dokumen Renstra Dinas. Tatkala penting yang menjadi fokus penyusunannya agar mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2021.

Renja PD merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun pelaksanaannya.

Batam, Agustus 2021
Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam



FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19680412 198909 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Berkenaan dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah....	22
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	31
3.3. Program dan Kegiatan.....	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	40
BAB V PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam. DPM-PTSP Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 56 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah sebagai berikut:

Merumuskan, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan dan Mempertanggungjawabkan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan

- Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan hidup;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan dan hidup.
 3. pembinaan dan pelaksanaan dibidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan dan hidup.
 4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terdiri dari :

- Sekretariat / Sekretaris (terdiri dari subbag. Program, subbag. Keuangan dan subbag. Umum dan Kepegawaian).
- Bidang Promosi, Data dan Informasi Investasiterdiri dari subbid. Promosi, subbid. Data Investasi dan subbid. Informasi Investasi).
- Bidang Pengawasan, pengendalian dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan, (terdiri dari Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Kasi Pengaduan, Fasilitas dan Advokasi, dan Kasi Pengawasan dan pengendalian Perizinan).
- Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial (terdiri dari Kasi Perizinan Sosial, Kasi Perizinan Ekonomi dan Kasi Perizinan Penanaman Modal).
- Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas (terdiri dari Kasi Perizinan Pembangunan, Kasi Perizinan Lingkungan Hidup dan Kasi Perizinan Utilitas).
- Bidang Promosi, Data dan Informasi (terdiri dari Kasi Promosi, Kasi Data Penanaman Modal dan Kasi Informasi Penanaman Modal);

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan yang di gunakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Perwako Batam Nomor 56 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Perwako Batam Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2020;
14. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 109/SE/I/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2021 ini dibuat sebagai tindaklanjut terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sistematika penulisan penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2021, merupakan penjabaran terhadap pencapaian Target Indikator Tahun 2021 yang tercantum dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam untuk mencapai Visi

dan Misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*) untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi.

Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mempergunakan Analisa *SWOT* berhasil merumuskan dan menganalisa lingkungan Internal (*AI*) dan menganalisa Lingkungan Eksternal (*AE*) yaitu sebagai berikut :

- ✓ Peraturan Daerah No.10/2016 tentang Susunan dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah:
- ✓ Perwako Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja OPD dan perwako Batam nomor 56 tahun 2016 tentang Tupoksi.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang PNS di 2019 berjumlah 38 Orang sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut;

KNDISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT STRATA PENDIDIKAN
TABEL. 1.

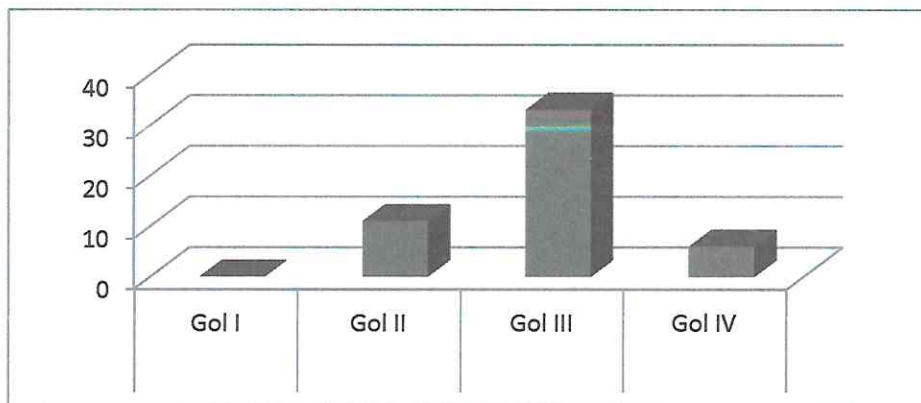
No.	Penempatan	Menurut Pendidikan					Jumlah
		SMU	D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	1	3	6	1	-	11
3.	Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi	-	1	2	2	-	5

4.	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan	-	1	7	-	-	8
5.	Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi	-	-	5	2	-	7
6.	Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas	1	-	3	2		6
Jumlah		2	5	23	8	1	38

KONDISI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN
TABEL. 2.

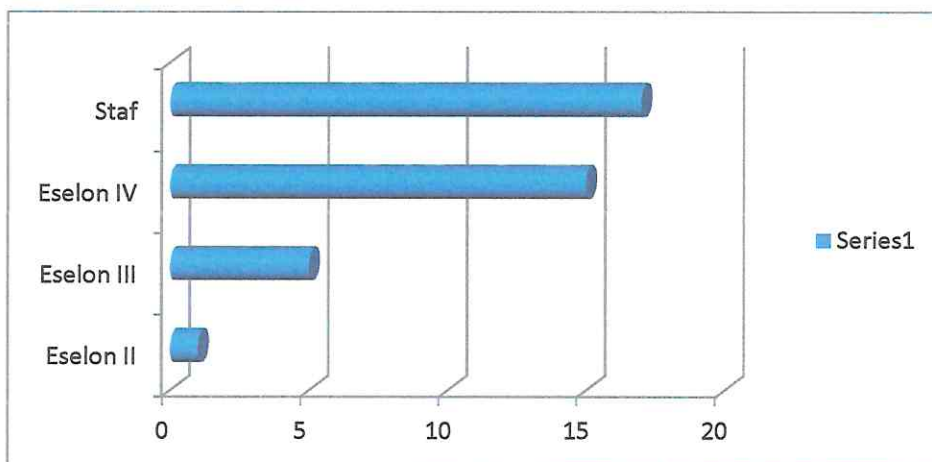
No.	PENEMPATAN	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	3	7	1	11
3.	Bidang Promosi, Data dan Informasi	-	-	4	1	5
4.	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan.	-	1	6	1	8
5.	Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi	-	-	7	-	7
6.	Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas	-	1	5	-	6
Jumlah		-	4	31	4	38

JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN
GAMBAR. 1.



KONDISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN
TABEL. 3

No.	PENEMPATAN	ESELON DAN STAF				Jumlah
		II	III	IV	STAF PNS	
1.	Kepala	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	7	11
3.	Bidang Promosi,Data dan Informasi	-	1	3	1	5
4.	Bidang Pengawasan,Pengendalian dan Pengaduan PenanamanModal Dan Perizinan.	-	1	3	4	8
5.	Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi	-	1	3	3	7
6.	Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas	-	1	3	2	6
Jumlah		1	5	15	17	38

Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon dan Staf
KONDISI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON
GAMBAR. 2.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DPMPSTP TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Batam Tahun 2021 sesuai hasil pemetaan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2021 melaksanakan 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 18.075.587.694 (delapan belas milyar tujuh puluh lima juta lima ratus lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Pengendalian Iklim Penanaman Modal**, dengan capaian program yakni : 8.14% dengan anggaran sebesar Rp.184.833.840 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota yakni : meningkatkan kesesuaian dokumen kajian potensi investasi terhadap promosi investasi yang dilaksanakan minat penanam modal dengan target kinerja 1 paket dokumen.

- II. Program Promosi Penanaman Modal** dengan capaian program Cakupan (90% per tahun) anggaran sebesar Rp. 225.295.760 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota Rp.225.295.760, outcome kegiatan ini yakni : meningkatkan jumlah pengunjung Pameran Penanaman Modal sebanyak 6 (enam) kali.

III. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Cakupan (10% per tahun) dengan anggaran Rp. 326.122.000, melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten dengan anggaran Rp. 326.122.000, outcome kegiatan ini yakni meningkatkan persentase perusahaan menyampaikan LKPM tepat pada waktunya.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

Cakupan (90% per tahun) dengan anggaran Rp. 554.345.120 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 554.345.120, outcome kegiatan ini yakni meningkatnya ketepatan waktu responsive berjalannya proses perizinan, konsultasi dan pengaduan.

V. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Cakupan (60% per tahun) dengan anggaran Rp. 88.412.880, melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran Rp. 88.412.880, outcome kegiatan ini yakni meningkatnya frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan system informasi perizinan yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dan 1 kali.

VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Cakupan (100% per tahun) dengan anggaran Rp. 16.696.578.094 melaksanakan 5 (lima) kegiatan yakni:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 8.538.891.634, outcome kegiatan ini yaitu meningkatnya persentase ketepatan waktu penyelenggaraan keuangan perangkat daerah dengan capaian target 100% per tahun. Sedangkan Output kegiatan ini yaitu terbayarkannya gaji, tunjangan ASN DPMPSTSP Kota Batam.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 762.916.500, outcome kegiatan ini yaitu meningkatnya Persentase ketepatan pemenuhan jasa perkantoran. Sedangkan Outputnya adalah tersedianya alat listrik elektronik; alat tulis; bahan bakar kendaraan dinas, konsumsi tamu; belanja percetakan,penjilidan; bahan bacaan koran dan majalah; dan terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 7.071.520.960, outcome kegiatan ini yaitu meningkatnya persentase ketepatan pemenuhan jasa perkantoran. Sedangkan outputnya adalah cakupan layanan administrasi perkantoran; tersedianya layanan arus listrik, layanan internet dan telepon; peralatan mesin fotocopy; gaji pegawai kontrak, materai kebutuhan dinas, premi asuransi pegawai kontrak DPMPSTSP.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 91.750.000, outcome kegiatan ini yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran. Sedangkan output kegiatan ini adalah tersedianya mebeleur dan peralatan Gedung kantor.
5. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.84.554.316, outcome kegiatan ini yakni : meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dengan capaian target kinerja 100% per tahun. Sedangkan output dari kegiatan adalah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, penyediaan jasa servis kendaraan bermotor, penyediaan penggantian suku cadang kendaraan bermotor, dan penyediaan pemeliharaan alat

kantor dan rumah tangga, dengan Target kinerja kegiatan 100% per tahun.

Uraian anggaran DPMPTSP Kota Batam di tahun 2020 diatas merupakan gambaran adanya perubahan perencanaan dan perubahan target kinerja yang akan dicapai oleh OPD. Dari 9 kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Batam tahun 2020 yang dapat dilaksanakan sesuai penjabaran V APBD 2020 adalah 5 kegiatan. Sehingga pada beberapa outcome dan output kegiatan tidak dapat direalisasikan di tahun 2020, meski demikian dalam hal pelayanan terpadu satu pintu tetap diupayakan pelayanan secara maksimal.

Gambaran anggaran tahun 2020 dan tahun 2019 tidak jauh berbeda, oleh karena di tahun 2019 DPMPTSP Kota Batam hanya melaksanakan 3 program 5 kegiatan yang terdiri dari :

- I. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan dengan 3 (tiga) capaian program yakni : *Realisasi Investasi* (2.5 T); *Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan* (1.800 Izin); dan *Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP* (90%) anggaran sebesar Rp.6.036.367.090 melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Promosi Penanaman Modal Rp.113.069.500, outcome kegiatan Meningkatnya minat investasi dengan target kinerja 1 Laporan rekapitulasi minat penanaman modal. Sedangkan output kegiatan terlaksananya promosi investasi daerah 1 kali (50 pengunjung) skala nasional di Semarang event Indonesi City Expo (ICE) 2019. Capaian realisasi target kegiatan 100% dengan serapan anggaran sebesar 99.91%;
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas, outcome kegiatan Meningkatnya kualitas layanan perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup dengan target kinerja 90% izin terbit sesuai SOP. Sedangkan output kegiatan terlaksananya pelayanan perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup (500 Izin) melalui penyediaan cetak

- sertifikat perizinan. Capaian realisasi target kinerja kegiatan 15.25% terdiri dari jumlah izin yang terbit 675 Izin dan yang yang terbit sesuai waktu SOP sebanyak 103 Izin dengan serapan anggaran sebesar 100%;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial, outcome kegiatan Meningkatnya kualitas layanan perizinan bidang ekonomi dan sosial dengan target kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat A (82.26-100). Sedangkan output kegiatan terlaksananya pelayanan perizinan bidang ekonomi dan sosial (1.300 Izin) cetak sertifikat perizinan; gaji dan premi asuransi tenaga kontrak (7 orang); sewa gedung Mal Pelayanan Publik (1 tahun); pengadaan monitor display (2 unit). Capaian realisasi target kinerja 63.63% terdiri dari jumlah izin yang terbit 2.310 Izin dan yang sesuai dengan waktu SOP 1.470 Izin, dengan serapan anggaran sebesar 97.91.
- II. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan, capaian program Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (100% per tahun) anggaran sebesar Rp.2.027.610.187 melaksanakan 1 (satu) kegiatan :
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, outcome kegiatan Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dengan target kinerja 100% per tahun. Sedangkan output kegiatan tersedianya gaji dan premi asuransi tenaga kontrak (32 orang); penyediaan alat tulis kantor; penyediaan materai, penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih; penyediaan BBM (6 bulan); penyediaan surat kabar (6 bulan); penyediaan biaya rekening listrik (1 tahun); penyediaan biaya langganan telpon (2 bulan); penyediaan biaya langganan internet (1 tahun); penyediaan cetak kop, amplop kop dan map dan penyediaan biaya rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah. Capaian realisasi target kinerja kegiatan 100% dengan serapan anggaran sebesar 90.78%.

- III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan capaian program *Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah daerah* (1 tahun), anggaran sebesar Rp.96.645.000 melaksanakan kegiatan :
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.96.645.000, outcome kegiatan yakni Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur dengan target kinerja 50%. Sedangkan output kegiatan tersedianya sarana dan prasarana aparatur berupa penyediaan bola lampu (35 pcs); penyediaan pengharum ruangan (500 botol); penyediaan jasa servis kendaraan bermotor (6 unit mobil). Capaian realisasi target kinerja kegiatan 100% dengan serapan anggaran 96.55%.

Selanjutnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2019 sampai triwulan ke 4 dapat dilihat sebagai pada tabel T-C.29 di halaman berikut :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2020

Tabel 4.

Tabel T-C.29

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kolaborasi kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Praktikan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan	Realisasi Investasi; Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Waktu SOP	Rp. 9.566.162.922.542; 47.008 Izin; 99%	Rp.4.762.402.100.000; 35.941 Izin; n.a	Rp.2.500.000.000.000; 1.800 Izin; 90%	Rp.4.876.613.000.000; 2.985 Izin; 52,69	100% 165,83 62,69	Rp.2.500.000.000.000; 2.100 Izin; 95%	Rp.9.639.015.000.000 10=(5+7+9)	100,76 87,28 68,69
	1 Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya penyebaran informasi investasi daerah di dalam negeri (Output: Terselenggaranya promosi potensi daerah)	6 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	5 Kali	83,33
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid.Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	Tertelaksananya operasional pelayanan publik (Output: Tertelaksananya pelayanan perizinan bid. lingkungan hidup dan utilitas)	5574 Izin	4174 Izin	500 Izin	675 Izin	135%	600 Izin	5.449 Izin	97,75
	3 Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Pembangunan Bid. Ekonomi dan Sosial	Menyelenggarakan ekonomi sosial (Output: Tertelaksananya pelayanan perizinan bid. ekonomi dan sosial)	35.511 Izin	30.201 Izin	1.300 Izin	2.310 Izin	177,69 %	1.500 Izin	34.011 Izin	95,80

Tabel T-C.29

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)				Target Program Kegiatan (Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019)	Praktoran Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi	8=(7/6)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
II	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran)	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100%	100% Per Tahun	300%	300	
III	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparaturnya Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur (Output : Sarana dan prasarana aparaturnya yang tersedia)	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	50%	50%	50%	200%	200	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rancangan akhir rencana kerja DPMPTSP Tahun 2021 akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra periode 2016-2021 DPMPTSP Kota Batam, yang juga mendukung terhadap capaian indikator kinerja RPJMD Kota Batam periode 2016-2021.

Pada rancangan akhir Renja, oleh karena telah mengalami perubahan sesuai hasil pemetaan program dan kegiatan Tahun 2021 maka terjadi perubahan pada indikator kinerja yakni di awal rancangan Renja fokus pada 3 (tiga) capaian indikator kinerja dinas yakni : (1) Realisasi Investasi (3 T); (2) Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan (2.100 Izin); dan (3) Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP (99%). Sedangkan setelah dilakukan pemetaan sesuai Permendagri No. 90 tahun 2019 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memetakan indikator antara dengan 8 (delapan) indikator kinerja yakni :

- ~ Program Promosi Penanaman Modal, indikator kinerja : Jumlah Minat Investasi berdasarkan lokasi dan sektor (3000 NIB);
- ~ Program Pelayanan Penanaman Modal, indikator kinerja : Persentase perizinan dan nonperizinan yang terbit sesuai waktu SOP (99%);
- ~ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, indikator kinerja : Jumlah Investor Berskala Nasional (250 Investor);
- ~ Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki indikator kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (A, 82.26-100);
- ~ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memiliki 2 (dua) indikator kinerja : Persentase penanganan permasalahan investasi PMDN (20%) dan; Rumusan kajian kebijakan penanaman modal (1 dokumen kajian).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Batam sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar melaksanakan urusan penanaman modal. Oleh karena itu dalam Perwako Batam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis urusan penanaman modal;
- b. Menyelenggarakan promosi penanaman modal;
- c. Melaksanakan pembinaan penanaman modal dan;
- d. Monitoring, evaluasi pelaksanaan penanaman modal

Penanaman modal/investasi PMDN di Kota Batam tahun 2019 sebanyak 384 investasi senilai Rp.4.876.613Jt, dilihat dari nilai yang diinvestasikan meningkat 53.28% dari di tahun 2018 sebanyak 170 investasi dengan nilai Rp.3.181.499Jt dan di tahun 2017 tercatat 60 investasi senilai Rp.1.091.488Jt. Tahun 2019 sebanyak 384 investasi dengan nilai Rp.4.876.613Jt dan serapan tenaga kerja sebanyak 1891, dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh penanaman modal yang terealisasi. Menurut jenisnya realisasi investasi kebanyakan berasal dari sektor perdagangan dan reparasi sesuai dengan kondisi Kota Batam yang dikhususkan sebagai kota industri dan investasi. Berikut realisasi investasi kurun waktu 4 (empat) terakhir.

Realisasi Investasi PMDN 2016-2019*

Tabel 4.

Tahun	Proyek		Investasi (Rp. Juta)		Tenaga Kerja	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2016	35	75	154.773	489.456	1354	1.575
2017	86	60	185.728	1.091.488	15.425	3.656
2018	3464	170	225.606	3.181.499	322.794	1.679
2019	7626	384	2.500.000	4.876.613	257.605	1.891
Total	11.211	691	3.066.107	9.693.056	21.758	8.081

Sumber : Bidang Promosi Datin

Sedangkan data realisasi investasi penanaman modal asing di Kota Batam sejak tahun 2016 s/d 2019 hanya mencapai 6.97% sebagaimana table di bawah ini :

Realisasi Investasi PMA 2016-2019*

Tabel 4.

Tahun	Proyek		Investasi (US\$.Ribu)		Tenaga Kerja	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2015	178	65	23.219.774.6	326.109	19.587	4.684
2016	146	71	5.167.386.1	462.844.5	11.750	4.571
2017	151	74	411.809.8	1.116.807.1	11.231	6.830
2018	73	41	305.700.8	124.281.5	6.057	2.537
Total	548	251	29.104.671.3	2.030.042	48.625	18.622

Sumber : Bidang Promosi Datin

Penyelenggaraan pelayanan publik layanan 53 jenis perizinan dan non perizinan di tahun 2019 baik melalui PTSP Online maupun aplikasi OSS yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa kegiatan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu dan satu tempat, dimana ada pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi (pemberi delegasi) ke pejabat yang lebih rendah (penerima delegasi). Selain melayani masyarakat yang langsung datang ke lokasi PTSP guna mendaftarkan izin usaha, masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran perizinan dan non perizinan melalui aplikasi OSS dari tempat tinggal maupun tempat usaha. Penyelenggara OSS yang adalah lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem OSS ini sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin usaha dan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing.

Dari analisis kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Batam dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dinas adalah untuk membantu Kepala Daerah mewujudkan Misi 1 (Pertama) dan Misi 4 (Empat) RPJMD Kota Batam periode 2016-2021, maka DPMPTSP Kota Batam menetapkan Indikator Kinerja guna mengukur capaian sasaran strategis yang akan dicapai untuk 1 (satu) tahun di tahun 2021 dan 5 (lima) tahun RPJMD. Kota Batam periode 2017-2021. Selanjutnya pencapaian kinerja

pelayanan DPMPTSP Kota Batam sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel T-C.30 di halaman berikutnya.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C.30

Tabel. 5.

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	2018	2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
1	Realisasi Investasi	3	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kota	5 Rp225,660,344,742	6 Rp2,5 T	7 Rp 2,5 T	8 Rp 3 T	100%	100%	10	Rp4,876,613,000,000	12 Rp 2,5T	12 Rp 3 T	13 -
2	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan			11,300 Izin	1,830 Izin	100%	100%	10,080 Izin (89%)	2,252 Izin	100%	100%	100%		
3	Persentase Waktu Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP			n.a	90%	95%	99%	n.a	52,69	95%	99%			
4	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100%	100% per tahun	100% per tahun	100% per tahun	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			100%	100% per tahun	100% per tahun	100% per tahun	100%	100%	100%	100%	100%		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kota Batam sebagai salah satu daerah yang termasuk dalam Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dimana pengelolaan Pulau Batam, Rempang dan Galang diserahkan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam. Konsekuensi dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 ini adalah hak pengelolaan atas tanah diberikan wewenangnya kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pemerintah Daerah Kota Batam dalam hal melaksanakan penanaman modal/investasi lebih kepada usaha menciptakan dan menjaga iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, sehingga untuk rancangan awal rencana kerja tahun 2021, penentuan isu-isu strategis urusan penanaman modal di Kota Batam masih relevan dengan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu perizinan;
- b. Kepastian dan ketepatan biaya perizinan;
- c. Peraturan dan kebijakan tentang penanaman modal;
- d. Data aktual arah investasi;
- e. Promosi penanaman modal;
- f. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- g. Kerjasama investasi G2G dan G2B;
- h. Pengawasan dan Pengendalian terhadap penanaman modal.

Kemudahan layanan perizinan secara elektronik dan selesai dalam satu pintu diyakini akan menambah jumlah investasi di Kota Batam. Yang merupakan bagian paling penting dan menentukan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi. Oleh karena itu keberadaan PTSP menjadi salah satu penentu minat investor dalam menentukan tujuan investasi dimana kemudahan layanan perizinan menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, cepat dan efektif, selain itu memberikan jaminan kepada para investor dan masyarakat akan kepastian hukum dalam memperoleh layanan perizinan dan berinvestasi serta hak masyarakat mendapatkan pelayanan prima.

8.538.891.634 untuk melaksanakan program penunjang pemerintahan daerah yakni belanja gaji dan tunjangan ASN dan Rp. 9.536.696.060 untuk melaksanakan urusan penanaman modal dan sub urusan penyelenggaraan terpadu satu pintu. Prioritas alokasi anggaran tahun di 2021 sesuai tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2016-2021 yakni : “Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi dengan Pelayanan Prima”. Dengan mengarahkan pada Sasaran Strategis (1) Meningkatnya realisasi investasi dan sasaran (2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. Kedua sasaran 4 terdiri dari 7 (tujuh) program dan 24 (kegiatan) sub kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Tujuan OPD : Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi dengan pelayanan prima, dengan 2 sasaran yaitu :
 1. Meningkatnya realisasi investasi, dengan indikator kinerja :
 - Realisasi investasi, dengan target kinerja sebesar Rp. 3 T;
 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, dengan indikator kinerja :
 - Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan dengan target kinerja sebanyak 2.100 Izin;
 - Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP, dengan target kinerja sebesar 99%

Hasil pemetaan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja terhadap rancangan akhir RKPD telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka rincian program, kegiatan dan sub kegiatan hingga indikator program dapat dilihat dalam tabel lampiran yang adalah hasil pemetaan terhadap program, kegiatan yang ada di dalam dokumen rancangan awal Renja, dapat dilihat lebih jelas dalam tabel T-C. 31 di bawah ini :

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKKD Tahun 2021
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Tabel T-C.31

No.	RANCANGAN AWAL RKKD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Batam	1. Persentase izin investasi yang ditindaklanjuti	5%	184.330.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Batam	Persentase izin investasi yang ditindaklanjuti	5%	118.089.840		
1.1.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		1.1. Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang dipenuhi	8%	184.330.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang dipenuhi	8%	118.089.840		
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota		1.1.1. Jumlah dokumen peta potensi investasi yang tersedia	1 Dokumen Kajian	184.330.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Batam	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang tersedia	1 Dokumen Kajian	118.089.840		
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Batam	2. Persentase Kepeminatan Investasi	90%	225.295.760	Program Promosi Penanaman Modal	Batam	Persentase Kepeminatan Investasi	90%	145.645.760		
2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota		2.1. Jumlah Pengunjung Pameran Penanaman Modal	200 Orang	225.295.760	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pengunjung Pameran Penanaman Modal	200 Orang	145.645.760		
			2.2. Rata-rata pengunjung media informasi promosi investasi	208.152 Pengunjung				Rata-rata pengunjung media informasi promosi investasi	208.152 Pengunjung			
2.1.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		2.1.1. Jumlah Pameran yang diikuti	2 Kali	225.295.760	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kali	145.645.760		
			2.1.2. Jumlah Promosi melalui media sosial	12 Kali				Jumlah Promosi melalui media sosial	12 Kali			
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Batam	3. Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai waktu SOP	90%	554.345.120	Program Pelayanan Penanaman Modal	Batam	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai waktu SOP	90%	554.345.120		
3.1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota		3.1. Tingkat Ketepatan Waktu responsif berjalanya proses perizinan, konsultasi dan pengaudan	90%	554.345.120	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Ketepatan Waktu responsif berjalanya proses perizinan, konsultasi dan pengaudan	90%	554.345.120		

3.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Batam	3.1.1. Persentase izin yang diterbitkan	90%	426.729.520	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Batam	Persentase izin yang diterbitkan	90%	426.729.520	
3.1.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		3.1.2. Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	46 Aduan	127.615.600	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	46 Aduan	127.615.600	
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	4. Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM	10%	326.122.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM	10%	326.122.000	
4.1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		4.1. Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	10%	326.122.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	10%	326.122.000	
4.1.1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pelaksanaan Penanaman Modal		4.1.1. Jumlah Data Investasi yang dikelola	4 Laporan	182.122.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Data Investasi yang dikelola	4 Laporan	36.474.000	
4.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		4.1.2. Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin Industri dan SIUP yang diawasi	200 Pelaku Usaha	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin Industri dan SIUP yang diawasi	200 Pelaku Usaha	131.083.000	
4.1.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		4.1.3. Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh pembinaan pelaksanaan penanaman modal	300 Izin/ SIUP	144.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1200 Izin/ SIUP	158.565.000	Diusulkan oleh Bidang Wasdu sesuai Juknis pelaksanaan
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Batam	Persentase Kesiediaan Data Investasi Secara Realtime	60%	88.412.880	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Batam	Persentase Kesiediaan Data Investasi Secara Realtime	60%	88.412.880	
5.1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah		Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang Disajikan	4 Kali	88.412.880	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah		Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang Disajikan	4 Kali	88.412.880	
			Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan yang dilaksanakan	1 Kali				Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan yang dilaksanakan	1 Kali		

5.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Batam	Jumlah data perizinan yang dikelola	4.500 Izin		Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Batam	Jumlah data perizinan yang dikelola	4.500 Izin	88.412.880	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	5. Tingkat Keunggulan Pelayanan Kedinasan	IKM (Berkategori Baik)	16.696.578.094	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Tingkat Keunggulan Pelayanan Kedinasan	IKM (Berkategori Baik)	14.678.278.428	
6.1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.1. Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8.538.891.634	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8.087.851.968	
6.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan ASN Tunjangan		5.1.1. Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	532 OB	8.448.841.634	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan ASN Tunjangan		Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	532 OB	7.997.801.968	
6.1.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		5.1.2. Jumlah kegiatan yang ditatausahaan dalam 1 tahun	324 Kegiatan	90.050.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah kegiatan yang ditatausahaan dalam 1 tahun	324 Kegiatan	90.050.000	
6.2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	5.2. Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	762.916.500	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	457.687.500	
6.2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		5.2.1. Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	110 Jenis	3.150.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	110 Jenis	3.150.000	
6.2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.2.2. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Jenis	142.323.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Jenis	142.323.500	
6.2.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.2.3. Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 Jenis	84.084.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	880 Jenis	84.084.000	
6.2.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.2.4. Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	32.750.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	32.750.000	
6.2.5.	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.2.5. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Jenis	1.800.000	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Kall	1.800.000	
6.2.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.2.6. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	94 Kali	498.809.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	94 Kali	213.776.000	
6.3..	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	5.3. Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	91.750.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	223.000.000	
6.3.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		5.3.1. Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 Jenis	79.250.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 Jenis	210.500.000	

6.3.2.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Batam	5.3.2. Jumlah jenis kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 Unit	12.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Batam	Jumlah jenis kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 Unit	12.500.000		
6.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	5.4. Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.071.520.960	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.736.618.960		
6.4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat		5.4.1. Jumlah jenis surat menyurat yang disediakan	24 Jenis	432.000	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat		Jumlah jenis surat menyurat yang disediakan	24 Jenis	0		
6.4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.4.2. Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Jenis	974.826.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Jenis	782.076.000		
6.4.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.4.3. Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Jenis	5.416.820.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Jenis	4.273.100.000		
6.4.4.	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor		5.4.4. Jumlah sasaran pelaksanaan pelayanan umum kantor yang difasilitasi (orang/kelompok)	299 OB	681.442.960	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah sasaran pelaksanaan pelayanan umum kantor yang difasilitasi (orang/kelompok)	416 OB	681.442.960		
6.5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	5.4.5. Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	231.499.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	173.120.000		
6.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		5.4.6. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	6 Unit	105.679.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	6 Unit	114.800.000		
6.5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.4.7. Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit	58.320.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit	58.320.000		
6.5.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.4.8. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	67.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	0	Penyesuaian SSH	
TOTAL					18.075.587.694	TOTAL					15.910.894.028	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam diusulkan melalui Rancangan Akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah Kota Batam oleh Kepala OPD yang kemudian dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan atas usulan rancangan awal Dinas.

Selanjutnya rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan dengan mengacu pada hasil forum perangkat daerah yang menghasilkan rancangan awal Renja PD yang telah disempurnakan dan rancangan awal Renja DPMPTSP Kota Batam diserahkan kepada Bappelitbangda Kota Batam untuk diverifikasi.

Rankhir Renja PD yang telah disempurnakan berdasarkan saran dan pertimbangan forum PD merupakan proses penyempurnaan Panwal Renja PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Kemudian Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD disajikan dengan sistematika sesuai Pasal 129 untuk diserahkan ke Bappelitbangda Kota Batam guna verifikasi setelah itu dapat disempurnakan dan diperbaiki sesuai hasil verifikasi.

Proses penyempurnaan Rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir PD berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Penyusunan dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam peraturan walikota tentang RKPD dan diverifikasi kembali oleh Bappelitbangda Kota Batam dan ditetapkan sebagai Renja PD setelah RKPD Kota Batam ditetapkan melalui peraturan walikota.

Melalui proses di atas DPMPTSP Kota Batam tidak memiliki usulan program/kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang mulai tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota akan tetapi program dan kegiatan yang diusulkan oleh DPMPTSP Kota Batam sesuai dengan tugas fungsi PD dan Rencana Strategis Dinas dalam mengemban Misi 4 (empat) yang ada di dalam RPJMD Kota Batam periode 2016-2021.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota tidak memiliki usulan program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat melalui mekanisme pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota dan forum OPD. Meski demikian DPMPSTP Kota Batam sesuai tugas fungsinya didalam melaksanakan pelayanan publik berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu dengan memberikan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan cara proses layanan perizinan dilakukan secara elektronik. Adapun tabel usulan program dan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 6.
Daftar Usulan Masyarakat

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
2	3	4	5	6
N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 6.

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/Kota	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Capaian Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Realisasi Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkannya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal
			Terwujudnya minat kerjasama penanaman modal	Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran
2.	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal
3.	Persentase Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang tertuang di dalam Renstra DPMPSTP Kota Batam yang adalah terjemahan dari visi dan misi Kepala Daerah (Walikota) RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, maka DPMPSTP Kota Batam menetapkan tujuan, sasaran dan indikator Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi dengan pelayanan prima	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP
		Persentase Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Fungsi dari tujuan dan sasaran OPD adalah guna mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan terlaksana sesuai dengan arah pembangunan daerah yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja bertujuan untuk mengukur capaian terhadap sasaran OPD. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan merupakan rangkaian dari pelaksanaan pembangunan daerah Kota Batam yang tepat dan berkesinambungan hingga 5 (lima) tahun ke depan.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan DPMPSTP di Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Rendahnya daya saing investasi daerah;
- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang profesional, transparan, mudah dan cepat;
- Sumber daya aparatur yang memahami tugas fungsi;
- Sarana dan prasarana yang memadai.

Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dianggarkan pada penyampaian RKPD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 18.075.587.694 (delapan belas milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah). Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II sub bab 2.2. bahwa adanya perubahan program dan kegiatan serta indikator kinerja yang menjadi indikator antara, dikarenakan telah dilakukan pemetaan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dalam Permendagri No. 90 tahun 2019. Pada rancangan awal Renja, DPMPSTP

Kota Batam menyusun rencana anggaran kegiatan dengan melaksanakan 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yakni :

- I. Program Pengendalian Iklim Penanaman Modal**, melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp.184.833.840

- II. Program Promosi Penanaman Modal** melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 225.295.760

- III. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten dengan anggaran Rp. 326.122.000.

- IV. Program Pelayanan Penanaman Modal** melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 554.345.120.

- V. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 1. Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran Rp. 88.412.880.

- VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** melaksanakan 5 (lima) kegiatan yakni:
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 8.538.891.634. keuangan perangkat daerah

dengan capaian target 100% per tahun. Sedangkan Output kegiatan ini yaitu terbayarkannya gaji, tunjangan ASN DPMPSTSP Kota Batam.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 762.916.500.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 7.071.520.960.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 91.750.000.
5. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp.84.554.316.

Pada usulan Perubahan Rancangan Kerja Tahun 2021 melaksanakan 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan usulan anggaran sebesar Rp. 15.910.894.028 sebagaimana pada table T-C.33

Tabel 8
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Sebelum dan sesudah Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	4	5	6	7	8
I	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rumusan Kajian Kebijakan Penanaman Modal, Persentase Penanganan Permasalahan Investasi PMDN	Rp. 3 T	Rp. 10 T	184.833.840	118.089.840
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Investasi	5%	5%	184.833.840	118.089.840
II	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Investor Berskala Nasional Berdasarkan Lokasi dan Sektor;	90%	90%	225.295.760	145.645.760
	Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat penanaman modal	200 Orang; 208.152 Pengunjung	200 Orang; 208.152 Pengunjung	225.295.760	145.645.760
III	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang terbit sesuai waktu SOP	90%	90%	426.729.520	426.729.520
	Kegiatan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan; IKM; Persentase Aduan Penanaman Modan dan Perizinan yang Ditindaklanjuti	90% 46 Aduan; 50 layanan	90% 46 Aduan; 50 layanan	426.729.520	426.729.520

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target		Pagu	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	4		5	6	7
IV	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Investor Berkala Nasional Berdasarkan Lokasi dan Sektor	10%	10%	326.122.000	326.122.000
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanam Modal yang menyampaikan LKPM secara berkala	4 laporan; 200 orang; 300 izin	4 laporan; 200 orang; 300 izin	326.122.000	326.122.000
V	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	60%	60%	88.412.880	88.412.880
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Informasi Investasi; Jumlah Perizinan yang Berbasis Elektronik; Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Perizinan	4509 Izin; 152 Jenis Perizinan	4509 Izin; 152 Jenis Perizinan	88.412.880	88.412.880
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	100%	100%	16.896.578.094	14.678.278.428
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	532 OB; 323 Kegiatan	532 OB; 323 Kegiatan	8.538.891.634	8.087.851.968
	Kegiatan Administrasi Umum	Cakupan layanan administrasi perkantolan dan pemenuhan sarana prasarana aparatur	110 Jenis; 32 Jenis; 9614 Jenis; 7 Jenis; 12 Jenis; 94 kali.	110 Jenis; 32 Jenis; 7238 Jenis; 7 Jenis; 12 Jenis; 94 kali.	762.916.500	457.887.500
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kelepatan pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100% 2 Jenis; 7 Jenis	100% 2 Jenis; 14 Jenis	91.750.000	223.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kelepatan pemenuhan jasa perkantoran	100% 24 Jenis; 36 Jenis; 24 Jenis; 299 OB	100% 24 Jenis; 24 Jenis; 299 OB	7.071.520.960	5.736.618.960
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kelepatan pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100% 6 Unit; 3 Unit; 1 Unit	100% 6 Unit; 3 Unit.	231.499.000	173.120.000

Selanjutnya rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam yang telah menggunakan hasil pemetaan program/kegiatan dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja atau indikator antara DPMPTSP Kota Batam, dalam pencapaian target kinerja sebagaimana pada tabel T-C.33 di bawah ini.

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Tabel T-C.33

Tabel T-C.33

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana			Tahun 2022		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif	
					APBD II	APBD I	APBN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah Minat Investor Berskala Nasional Berdasarkan Lokasi dan Sektor.	3000 NIB;	225.295.760				6000 NIB;	250.000.000	
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Skala Nasional	Jumlah minat penanaman modal	1 Rekapitulasi Laporan Minat Penanam Modal; 250 Pengunjung	225.295.760	-	-		1 Rekapitulasi Laporan Minat Penanam Modal; 600 Pengunjung	250.000.000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Batam	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang terbit sesuai waktu SOP	99 %	426.729.520	-	-		99%	550.100.000	
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Batam	Jumlah Izin yang diterbitkan; IKM; Persentase Aduan Penanaman Modal dan Perizinan yang Ditindaklanjuti	2.100 Izin; A (82.26-100); (100%)	426.729.520	-	-		2.100 Izin IKM A(82.26-100); 100%	550.100.000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Investor Berskala Nasional Berdasarkan Lokasi dan Sektor	250 Investor	326.122.000				500 Investor	72.900.000	
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Persentase Penanam Modal yang menyampaikan LKPM secara berkala	5%	326.122.000	-	-		5%	72.900.000	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Batam	IKM	A(82.26-100)	88.412.880	-	-	A(82.26-100)	150.000.000	
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Batam	Jumlah Publikasi Informasi Investasi; Jumlah Perizinan yang Berbasis Elektronik; Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Perizinan	1 Kali; 45 Perizinan; 2 Aplikasi	88.412.880	-	-	1 Kali; 45 Perizinan; 2 Aplikasi	150.000.000	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Batam	Rumusan Kajian Kebijakan Penanaman Modal; Persentase Penanganan Permasalahan Investasi PMDN	1 Dokumen Kajian; 20%	184.833.840	-	-	1 Dokumen Kajian; 20%	240.000.000	
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Batam	Jumlah Dokumen Peta Investasi	1 Dokumen	184.833.840	-	-	1 Dokumen	240.000.000	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	38 ASN	16.696.578.094	-	-	38 ASN	19.384.005.416	
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	38 ASN	8.538.891.634	-	-	38 ASN	9.410.498.876	
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum	Batam	Cakupan layanan administrasi perkantoran dan pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	762.916.500	-	-	100%	708.654.850	
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	kelepatan pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	91.750.000	-	-	100%	1.202.933.000	
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	kelepatan pemenuhan jasa perkantoran	100%	7.071.520.960	-	-	100%	7.718.511.690	
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	kelepatan pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	231.499.000	-	-	100%	343.407.000	

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan DPMPTSP Kota Batam Tahun Anggaran 2021 telah disusun sesuai Renstra Dinas periode 2017-2021 dan hasil pemetaan program/kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Pembahasan pemetaan program/kegiatan dan usulan rencana kerja Dinas telah melalui tahapan dan mekanisme perencanaan oleh Bappelitbangda Kota Batam. Tabel terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2021. Sebagaimana disebut dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan KUA tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan agar capaian sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah di tahun 2021 dapat terlaksana dan terealisasi.

Dalam menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah, belum melakukan evaluasi keseluruhan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021, meski demikian telah mengumpulkan data pelaksanaan pelayanan kinerja Dinas tahun 2021 hingga Triwulan II, yang bertujuan untuk mengetahui apakah target indikator kinerja dapat tercapai dan terlaksana dengan baik serta mengurai permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga rencana kerja (Renja) perubahan Tahun 2021 dapat terencana dengan baik dan terukur serta memenuhi perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas dan Walikota.

Renja Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 DPMPTSP Kota Batam juga disusun berdasarkan rumusan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD dan RPJMD Kota Batam 2016-2021, dan mengumpulkan data mengenai perkembangan permasalahan pembangunan daerah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target indikator kinerja Dinas DPMPTSP tahun 2021 serta berorientasi terhadap kepuasan publik dalam memperoleh layanan investasi dan perizinan.

Ada 7 (tujuh) faktor penentu keberhasilan fokus penanaman modal di dalam dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2021 yaitu :

- Menciptakan iklim investasi kondusif;
- Meningkatkan promosi peluang investasi;
- Meningkatkan pelayanan perizinan secara terpadu;
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
- Meningkatkan evaluasi perencanaan kegiatan dan investasi serta sistem data informasi;

- Meningkatkan pengembangan, pembinaan kerjasama penanaman modal dan investasi;
- Meningkatkan efektivitas penggunaan aset dan aparatur.

Ketujuh faktor penentu keberhasilan fokus penanaman modal diatas telah tergambar didalam program, kegiatan dan anggaran DPMPTSP Kota Batam dalam Renja Perubahan 2021 beserta target capaiannya.

Pada akhirnya dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi Perangkat Daerah untuk mencapai target indikator kinerja Dinas dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Kota Batam.

Batam, Agustus 2021
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19680412 198909 1 002

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Batam
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Praktiran Maju Rencana Tahun 2022		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan		Sebelum				Sesudah			Target Capaian Kinerja	Target
						Program	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
2.18.02.2.01	Perencanaan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Tersedianya pemetaan peluang potensi investasi daerah		Tingkat kesesuaian dokumen kajian potensi investasi terhadap promosi-investasi yang dilaksanakan		1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	184.833.840	118.089.840	PENDAPATAN ASU DAERAH		239.478.300		
2.18.03.1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											225.295.760	145.645.760			264.979.550		
2.18.03.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											225.295.760	145.645.760			264.979.550		
2.18.04.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											554.345.120	554.345.120			632.615.000		
2.18.04.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibanding Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											554.345.120	554.345.120			632.615.000		
2.18.04.1.2.0	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu											426.729.520	426.729.520	PENDAPATAN ASU DAERAH		487.082.500		
2.18.04.1.2.0.01	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											426.729.520	426.729.520	PENDAPATAN ASU DAERAH		487.082.500		
2.18.05.1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											326.122.000	326.122.000			80.950.800		
2.18.05.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											326.122.000	326.122.000			80.950.800		
2.18.05.1.2.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal											182.122.000	36.474.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		80.950.800		
2.18.05.1.2.0.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal											182.122.000	36.474.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		80.950.800		



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpspbataam@gmail.com

BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**

Nomor : KPTS.022/DPMPSTSP.01/12/2019

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BATAM
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2019-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
 20. Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020;
 21. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69-1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Renstra OPD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2021
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2021 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2021 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM TAHUN
ANGGARAN 2021

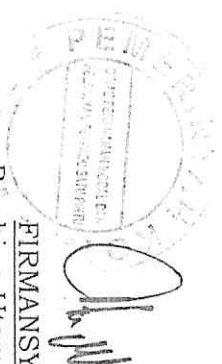
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM	PENANGGUNGJAWAB
3.	KASUB.BAG. PERENCANAAN DAN PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM	SEKRETARIS
1	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENANAMAN MODAL	
NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KABID. PROMOSI, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR
2.	KASI. PROMOSI PENANAMAN MODAL	ANGGOTA
3.	KASI. DATA PENANAMAN MODAL	ANGGOTA
4.	KASI. INFORMASI PENANAMAN MODAL	ANGGOTA

II	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL	
NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KABID. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	KOORDINATOR
2	KASI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	ANGGOTA
3	KASI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN	ANGGOTA
4	KASI. FASILITASI, PENGADUAN DAN KONSULTASI SERTA MEDIASI	ANGGOTA
III	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERIZINAN EKONOMI DAN SOSIAL	
1	KABID. PERIZINAN EKONOMI DAN SOSIAL	KOORDINATOR
2	KASI PERIZINAN EKONOMI	ANGGOTA
3	KASI. PERIZINAN SOSIAL	ANGGOTA
4	KASI. PERIZINAN PENANAMAN MODAL	ANGGOTA
IV	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	KABID. PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KOORDINATOR
2	KASI. PERIZINAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
3	KASI. PERIZINAN UTILITAS	ANGGOTA
4	KASI. PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA

V		PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT	
	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	
1	KASUB.BAG. UMUM KEPEGAWAIAN	KOORDINATOR	
2	KASUB. BAG. KEUANGAN	ANGGOTA	
3	PELAKSANAAN SUB.BAG. PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA	

Batam, 06 Desember 2019
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BATAM



FIRMANSYAH
 FIRMANSYAH

Pembina Utama Muda
 NIP.19680412 198909 1 002